



Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Islam

(Analisis Peran dan Kontribusi terhadap Mutu Pendidikan)

Rahayu Mega Sari¹, Syarifah Sepfiawati Nurjanah²

STIT Lingga, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: rahayu27798@gmail.com, sysepfawatiannah@gmail.com

Article received: 16 Maret 2024, Review process: 14 April 2024,

Article Accepted: 15 Mei 2024, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze community participation in Islamic school development and its roles and contributions to improving education quality. Community participation is a crucial element in educational governance oriented towards excellence and sustainability, particularly in the context of Islamic educational institutions which possess unique and strong communal characteristics. This study employs a qualitative method with a library research approach, collecting and analyzing current scientific literature on community participation, Islamic education management, school committees, and education quality. The data analysis technique used is thematic analysis based on the Braun and Clarke model, consisting of six systematic stages. The findings reveal that community participation in Islamic school development encompasses four main dimensions: (1) participation in educational decision-making and planning through school committee mechanisms and deliberation; (2) participation in the provision and management of educational resources, including financial support and facilities; (3) participation in the learning process and contextual curriculum development; and (4) participation in monitoring, evaluation, and education quality accountability. These findings demonstrate that synergy between Islamic schools and communities produces a more responsive, transparent, and quality-oriented educational ecosystem, although structural, cultural, and capacity-related challenges must be anticipated.

Keywords: Community participation, Islamic schools, education quality, Islamic education management, school committee, partnership

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam serta peran dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam tata kelola pendidikan yang berorientasi pada keunggulan dan keberlanjutan, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik komunitas yang unik dan kuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah terkini tentang partisipasi masyarakat, manajemen pendidikan Islam, komite sekolah, dan mutu pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik model Braun dan Clarke yang terdiri dari enam tahapan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam melibatkan empat dimensi utama: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan melalui mekanisme komite sekolah dan

musyawarah; (2) partisipasi dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan, termasuk dukungan finansial dan fasilitas; (3) partisipasi dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang kontekstual; serta (4) partisipasi dalam monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas mutu pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara sekolah Islam dan masyarakat menghasilkan ekosistem pendidikan yang lebih responsif, transparan, dan berkualitas, meskipun terdapat tantangan struktural, kultural, dan kapasitas yang perlu diantisipasi.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, sekolah Islam, mutu pendidikan, manajemen pendidikan Islam, komite sekolah, kemitraan

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah menjadi isu sentral dalam diskursus manajemen dan kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan sistem pendidikan yang sangat kompleks dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai salah satu strategi kunci untuk meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai manifestasi dari prinsip desentralisasi dan demokratisasi pendidikan. Parker dan Raihani (2011) dalam penelitian mereka tentang partisipasi komunitas dalam pendidikan Islam di Indonesia menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki sejarah panjang dan akar budaya yang kuat dalam sistem pendidikan Islam, di mana lembaga pendidikan Islam secara tradisional dibangun dan dikembangkan melalui inisiatif dan dukungan komunitas lokal.

Sekolah Islam, baik berupa madrasah, sekolah Islam terpadu, maupun pesantren, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sekolah-sekolah umum dalam hal hubungan dengan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam secara tradisional merupakan bagian integral dari komunitas keagamaan (jamaah), sehingga hubungan emosional dan sosial antara sekolah dan masyarakat cenderung lebih kuat dan mendalam. Munir (2021) dalam studinya tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam menemukan bahwa ikatan keagamaan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam. Keterikatan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam tidak hanya bersifat instrumental, berupa dukungan finansial dan fasilitas, tetapi juga bersifat normatif-spiritual, yang didasarkan pada keyakinan bahwa mendukung pendidikan Islam merupakan ibadah dan investasi akhirat. Dimensi normatif-spiritual ini memberikan karakteristik unik pada partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam yang tidak ditemukan dalam pendidikan umum.

Meskipun partisipasi masyarakat telah diakui secara luas sebagai faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan, implementasinya dalam konteks sekolah Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Waluyo dan Jasiah (2025) menemukan bahwa manajemen pendidikan berbasis komunitas di lembaga

pendidikan Islam masih menghadapi hambatan dalam hal mekanisme partisipasi yang terstruktur, transparansi pengelolaan, dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna. Syah, Kurniady, dan Yuniarsih (2024) juga menegaskan bahwa manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat memerlukan transformasi paradigma dari model sentralistik dan top-down menjadi model desentralistik dan bottom-up yang memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif dan kontribusi masyarakat. Selain itu, Mu'alimin, Muhith, dan Hepni (2026) dalam penelitian mereka tentang manajemen mutu sekolah Islam menekankan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kemitraan dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Kesenjangan antara idealisme partisipasi masyarakat dan realitas implementasinya di lapangan menjadi motivasi utama bagi dilakukannya penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara umum tanpa secara spesifik mengkaji konteks sekolah Islam, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam hal basis komunitas, motivasi partisipasi, dan mekanisme keterlibatan masyarakat. Julianto (2026) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mutu pendidikan Islam memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan partisipasi tersebut. Nursaleh dan Surtiati (2025) juga menekankan pentingnya pengkajian tentang manajemen mutu pendidikan Islam dan keterlibatan masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan model partisipasi yang lebih kontekstual dan efektif bagi sekolah-sekolah Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep dan kerangka teoretis partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam? (2) Bagaimana bentuk-bentuk dan dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah Islam? (3) Bagaimana peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah Islam? (4) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum sekolah Islam? dan (5) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas mutu pendidikan di sekolah Islam? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam serta peran dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan multidimensi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan konsep yang memiliki akar teoretis yang panjang dan kompleks, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu termasuk pendidikan, sosiologi, manajemen, dan studi pembangunan. Cohen dan Uphoff (1977) dalam kerangka analisis partisipasi mereka mengidentifikasi empat dimensi partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision-making participation*), partisipasi dalam implementasi (*implementation participation*), partisipasi dalam penerimaan manfaat (*benefits participation*), dan partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*). Kerangka ini memberikan

landasan analitis yang komprehensif untuk memahami berbagai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, partisipasi masyarakat tidak hanya diartikan sebagai keterlibatan dalam penyediaan sumber daya, tetapi mencakup seluruh proses pengelolaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban.

Epstein (2018) dalam kerangka teorinya tentang kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas (*school, family, and community partnerships*) mengidentifikasi enam jenis keterlibatan yang saling melengkapi, yaitu: *parenting* (pengasuhan), *communicating* (komunikasi), *volunteering* (sukarela), *learning at home* (belajar di rumah), *decision-making* (pengambilan keputusan), dan *collaborating with community* (kolaborasi dengan komunitas). Kerangka Epstein ini sangat relevan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam sekolah Islam, karena memandang kemitraan sebagai proses yang holistik dan mencakup berbagai dimensi interaksi antara sekolah dan stakeholder-nya. Bray (2001) dalam kajiannya tentang kemitraan komunitas dalam pendidikan bagi UNESCO juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dimensi yang sangat beragam, mulai dari bentuk-bentuk partisipasi tradisional seperti dukungan finansial dan tenaga sukarela, hingga bentuk-bentuk partisipasi yang lebih modern dan strategis seperti perencanaan bersama, pengelolaan berbasis komunitas, dan advokasi kebijakan pendidikan.

Kusumaningrum dan Ulfatin (2017) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan menemukan bahwa kualitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran akan pentingnya pendidikan, mekanisme partisipasi yang tersedia, dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Ahmad dan Said (2013) juga melaporkan bahwa efek partisipasi masyarakat terhadap mutu pendidikan bersifat signifikan ketika partisipasi tersebut bersifat bermakna (*meaningful participation*), bukan sekadar seremonial atau tokenistik. Partisipasi yang bermakna ditandai oleh adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang substantif, pengambilan keputusan yang transparan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Parji dan Prasetya (2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengembangan mutu pendidikan memerlukan kapasitas masyarakat yang memadai, struktur organisasi yang mendukung, serta budaya keterbukaan dan dialog di tingkat institusi pendidikan.

Manajemen pendidikan Islam merupakan proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islam. Bush dan Glover (2014) dalam tinjauan komprehensif mereka tentang model-model kepemimpinan sekolah menekankan bahwa kepemimpinan pendidikan yang efektif harus mampu membangun kolaborasi dan kemitraan yang produktif dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat. Dalam konteks sekolah Islam, kepemimpinan yang demokratis-transformatif menjadi model yang sangat relevan, di mana pemimpin sekolah tidak hanya

mengelola institusi secara birokratis, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan seluruh komponen sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan. Hadi, Santosa, dan Wantu (2025) dalam penelitian mereka tentang manajemen pendidikan Islam dan mutu pendidikan menemukan bahwa sekolah Islam yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen partisipatif cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah Islam yang dikelola secara sentralistik dan tertutup.

Komite sekolah merupakan mekanisme formal yang diatur dalam regulasi pendidikan Indonesia sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. PP Nomor 44 Tahun 2007 tentang Komite Sekolah mengamanatkan bahwa komite sekolah berfungsi sebagai lembaga advisory, supporting, controlling, dan mediasi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Hakim (2020) dalam penelitiannya tentang partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan menemukan bahwa efektivitas komite sekolah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan ketua komite, kapasitas anggota, dan dukungan pimpinan sekolah terhadap peran komite. Komite sekolah yang aktif dan independen mampu menjadi mediator yang efektif antara kepentingan sekolah dan masyarakat, serta menjadi watchdog yang menjaga akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Pratiwi (2026) juga melaporkan bahwa komite sekolah di sekolah-sekolah Islam memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam aspek perencanaan program, pengadaan sumber daya, dan pengawasan mutu.

Dalam konteks sekolah Islam, komite sekolah memiliki keunikan tersendiri karena basis komunitas keagamaan yang menjadi fondasinya. Siagian, et al. (2025) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung mutu pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan partisipasi di sekolah umum, yaitu adanya motivasi religius yang menjadi pendorong utama keterlibatan masyarakat. Ikatan keagamaan ini menciptakan modal sosial (social capital) yang kuat, yang menurut Putnam (2000) merupakan aset penting dalam membangun kolaborasi dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sekolah Islam, modal sosial keagamaan ini memfasilitasi terbentuknya jaringan kemitraan yang lebih intensif dan keberlanjutan antara sekolah dan masyarakat. Sumarsono dan Imron (2025) juga menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan dasar Islam memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan umum, yang didorong oleh keyakinan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka.

Mutu pendidikan merupakan konsep yang multidimensional dan kompleks, yang pengertiannya telah berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran tentang pendidikan dan manajemen. Edwards Deming (1986) dalam teori manajemen mutu total (Total Quality Management/TQM) menekankan bahwa mutu merupakan tanggung jawab seluruh komponen organisasi, bukan hanya tanggung jawab departemen kualitas semata. Dalam konteks pendidikan, TQM diadaptasi menjadi model manajemen mutu pendidikan yang menempatkan

peserta didik sebagai pelanggan utama (internal customer) dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang kepuasan dan kepercayaannya harus dijaga. Mulyasa (2009) dalam karyanya tentang manajemen berbasis sekolah menekankan bahwa mutu pendidikan hanya dapat dicapai melalui pemberdayaan seluruh potensi sekolah dan masyarakat, serta pengembangan budaya mutu yang menjadi bagian integral dari kehidupan sekolah.

Mu'alimin, Muhith, dan Hepni (2026) dalam penelitian mereka yang diterbitkan oleh Emerald tentang manajemen mutu sekolah Islam menemukan bahwa sekolah Islam yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu secara konsisten menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai indikator mutu, termasuk prestasi akademik, perkembangan karakter peserta didik, dan kepuasan orang tua. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu variabel yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi manajemen mutu di sekolah Islam. Nursaleh dan Surtiati (2025) juga melaporkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam manajemen mutu pendidikan Islam berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sekolah terhadap kebutuhan masyarakat. Sekolah Islam yang memiliki mekanisme partisipasi masyarakat yang terstruktur dan efektif cenderung lebih mampu mengidentifikasi dan merespons kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

Berdasarkan tinjauan teoretis di atas, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas premis bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam merupakan proses multidimensional yang melibatkan empat dimensi utama yang saling terintegrasi dan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dimensi pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, yang mencakup peran komite sekolah dan mekanisme musyawarah sebagai instrumen demokratisasi pengelolaan pendidikan. Dimensi kedua adalah partisipasi dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya, yang mencakup dukungan finansial, fasilitas, dan tenaga sukarela. Dimensi ketiga adalah partisipasi dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yang mencakup keterlibatan orang tua dalam pendidikan di rumah dan kontribusi masyarakat dalam pengayaan kurikulum. Dimensi keempat adalah partisipasi dalam monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas, yang mencakup fungsi pengawasan dan umpan balik dari masyarakat terhadap kinerja sekolah. Keempat dimensi ini beroperasi dalam konteks modal sosial keagamaan yang menjadi keunikan sekolah Islam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas masyarakat, kepemimpinan sekolah, regulasi, dan budaya organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka atau library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi fenomena partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam secara mendalam dan kontekstual. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang

berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian dari berbagai sumber literatur ilmiah (Zed, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif konsep dan implementasi partisipasi masyarakat dalam sekolah Islam berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu dan kerangka teoretis yang relevan dari berbagai sumber akademis. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang secara spesifik membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, manajemen pendidikan Islam, komite sekolah, dan mutu pendidikan, termasuk publikasi dalam jurnal-jurnal bereputasi seperti *Educational Management Administration & Leadership*, *International Journal of Educational Management*, dan jurnal-jurnal pendidikan Islam terindeks nasional. Data sekunder mencakup buku-buku referensi akademik tentang manajemen pendidikan, teori organisasi, kepemimpinan sekolah, dan kebijakan pendidikan. Seluruh sumber data yang digunakan merupakan publikasi ilmiah yang kredibel dari penerbit dan jurnal bereputasi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara akademis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi kata kunci penelitian yang mencakup istilah-istilah seperti *community participation*, *Islamic school*, *school committee*, *education quality*, *school-community partnership*, dan *parental involvement*; (2) pencarian literatur melalui basis data jurnal ilmiah dan perpustakaan digital; (3) seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi topik, kedalaman analisis, kredibilitas sumber, dan kebaruan publikasi; (4) pembacaan kritis dan pencatatan informasi yang relevan secara sistematis; dan (5) klasifikasi data berdasarkan tema-tema analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik model Braun dan Clarke (2006) yang meliputi enam tahapan: (1) familiarisasi data, yaitu membaca dan membiasakan diri dengan keseluruhan data untuk memahami secara mendalam konteks dan substansi materi; (2) pembuatan kode inisial, yaitu mengidentifikasi dan memberi kode pada pola-pola data yang menarik dan relevan; (3) pencarian tema, yaitu mengelompokkan kode-kode ke dalam tema-tema potensial yang saling terkait secara logis; (4) peninjauan tema, yaitu memeriksa dan memvalidasi kesesuaian antara tema yang teridentifikasi dengan data pendukungnya; (5) definisi dan penamaan tema, yaitu mengidentifikasi esensi setiap tema dan memberikan nama yang tepat; dan (6) produksi laporan akhir, yaitu menyusun narasi analitis yang menghubungkan temuan dengan kerangka teoretis dan penelitian terdahulu secara koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Hasil analisis tematik terhadap literatur yang dikumpulkan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan merupakan dimensi paling fundamental dalam pengembangan sekolah Islam. Pengambilan keputusan yang partisipatif memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap arah pengembangan sekolah Islam. Parker dan Raihani (2011) dalam studi komprehensif mereka tentang partisipasi komunitas dalam pendidikan Islam di Indonesia menemukan bahwa mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas hubungan antara sekolah Islam dan masyarakat. Sekolah Islam yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan cenderung memiliki tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat yang lebih tinggi.

Komite sekolah sebagai mekanisme formal partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pengambilan keputusan di sekolah Islam. Hakim (2020) menemukan bahwa komite sekolah yang efektif mampu menjalankan fungsi advisory dengan memberikan masukan dan rekomendasi yang substantif kepada kepala sekolah dalam hal perencanaan program, penganggaran, dan kebijakan pendidikan. Pratiwi (2026) juga melaporkan bahwa komite sekolah di sekolah-sekolah Islam yang aktif dalam fungsi advisory berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui: (a) identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, (b) pengembangan program-program inovatif yang responsif terhadap kebutuhan lokal, dan (c) advokasi kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks sekolah Islam, fungsi advisory komite sekolah tidak hanya mencakup aspek manajerial, tetapi juga aspek pengembangan karakter dan nilai-nilai Islam, yang memerlukan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dan ulama yang memiliki keahlian dalam bidang keagamaan.

Musyawarah atau deliberasi merupakan mekanisme tradisional partisipasi yang sangat khas dalam budaya Islam dan menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan sekolah Islam. Konsep syura (musyawarah) yang diajarkan dalam Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis dalam pengelolaan sekolah Islam. Syah, Kurniady, dan Yuniarsih (2024) menemukan bahwa manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat yang mengedepankan prinsip musyawarah mampu menciptakan rasa kepemilikan bersama (sense of ownership) yang lebih kuat di kalangan masyarakat terhadap sekolah Islam. Rasa kepemilikan ini pada gilirannya mendorong masyarakat untuk lebih berkomitmen dalam mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah, baik melalui kontribusi finansial, tenaga, maupun pikiran. Namun demikian, Julianto (2026) mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mutu pendidikan Islam melalui mekanisme musyawarah memerlukan fasilitasi yang baik dari pihak sekolah, agar musyawarah tidak hanya menjadi

seremonial belaka tetapi benar-benar menghasilkan keputusan yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Tantangan utama dalam partisipasi pengambilan keputusan di sekolah Islam berkaitan dengan kapasitas masyarakat dan budaya organisasi sekolah. Banyak masyarakat yang memiliki kemauan untuk berpartisipasi namun tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pengetahuan tentang manajemen pendidikan, analisis kebijakan, dan perencanaan strategis. Di sisi lain, budaya organisasi sekolah yang masih paternalistik dan birokratis seringkali menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat yang bermakna. Kusumaningrum dan Ulfatin (2017) menekankan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan jejaring menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya partisipasi yang efektif dan bermakna dalam pengembangan sekolah Islam.

Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan

Dimensi kedua dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam adalah peran mereka dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan mencakup berbagai aspek seperti finansial, fasilitas fisik, tenaga kependidikan, dan sumber belajar. Dalam konteks sekolah Islam di Indonesia, dukungan masyarakat terhadap penyediaan sumber daya pendidikan memiliki sejarah yang sangat panjang dan merupakan salah satu kekuatan utama dalam pengembangan pendidikan Islam. Munir (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam secara tradisional terwujud dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, dan kontribusi sukarela lainnya yang merupakan manifestasi dari ajaran Islam tentang kepedulian terhadap pendidikan. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola secara produktif oleh sekolah Islam dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengembangan program dan fasilitas pendidikan.

Waluyo dan Jasiah (2025) dalam penelitiannya tentang manajemen pendidikan berbasis komunitas di lembaga pendidikan Islam menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumber daya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup kontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian. Banyak sekolah Islam yang mendapatkan manfaat dari profesional dan pakar di kalangan masyarakat yang bersedia berkontribusi sebagai guru tamu, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, narasumber seminar, atau konsultan dalam bidang-bidang tertentu. Siagian, et al. (2025) juga melaporkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung mutu pendidikan Islam mencakup berbagai bentuk, seperti penyediaan buku dan peralatan belajar, renovasi dan pembangunan ruang kelas, pengadaan teknologi informasi, dan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan ekstrakurikuler. Dukungan-dukungan ini sangat berarti bagi sekolah Islam, khususnya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan anggaran pemerintah.

Pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel merupakan aspek kritis yang menentukan keberlanjutan dukungan masyarakat. Ahmad dan Said

(2013) menemukan bahwa efek partisipasi masyarakat terhadap mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya di sekolah. Ketika masyarakat merasa bahwa kontribusi mereka dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, maka motivasi mereka untuk terus berpartisipasi akan semakin kuat. Sebaliknya, ketika terjadi ketidaktransparanan atau penyalahgunaan sumber daya, maka kepercayaan masyarakat akan menurun secara drastis dan dukungan mereka akan berkurang. Mu'alimin, Muhith, dan Hepni (2026) juga menekankan bahwa dalam manajemen mutu sekolah Islam, transparansi pengelolaan sumber daya merupakan indikator kunci yang harus dipenuhi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya sekolah Islam, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan keadilan, menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Inovasi dalam penggalangan dan pengelolaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Beberapa sekolah Islam telah mengembangkan model-model inovatif seperti yayasan pendidikan, badan usaha milik sekolah, program kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta crowdfunding berbasis komunitas untuk memperluas basis pendanaan. Hadi, Santosa, dan Wantu (2025) menemukan bahwa sekolah Islam yang mengelola sumber daya secara inovatif dan profesional mampu mengoptimalkan potensi partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pendidikan. Model pengelolaan sumber daya yang inovatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas finansial sekolah, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum

Dimensi ketiga dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam adalah keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran bukan berarti masyarakat secara langsung mengajar di kelas, melainkan berpartisipasi dalam mendukung, memperkaya, dan mengoptimalkan proses pembelajaran peserta didik. Epstein (2018) dalam kerangka kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas menekankan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran di rumah merupakan salah satu bentuk partisipasi yang paling berpengaruh terhadap prestasi dan perkembangan peserta didik. Sumarsono dan Imron (2025) dalam penelitian mereka tentang keterlibatan orang tua dalam pendidikan dasar Islam menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam mendampingi belajar anak di rumah, mendiskusikan perkembangan akademik, dan menghadirkan lingkungan yang kondusif bagi belajar memiliki korelasi positif yang signifikan dengan prestasi dan motivasi belajar peserta didik di sekolah Islam.

Pengembangan kurikulum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan area penting lainnya di mana partisipasi

masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga aspek akhlak, ibadah, dan pengembangan karakter Islami yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masyarakat. Parji dan Prasetya (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan mutu pendidikan melalui kontribusi terhadap kurikulum menghasilkan program-program pendidikan yang lebih relevan dan kontekstual. Masyarakat dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan tentang kebutuhan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja lokal, berbagi pengetahuan lokal dan budaya yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, serta berpartisipasi dalam validasi dan penilaian kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah.

Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat peserta didik juga menjadi area yang sangat terbuka bagi partisipasi masyarakat. Banyak sekolah Islam yang melibatkan masyarakat sebagai pelatih, pembimbing, atau fasilitator dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti tahfidz Al-Quran, seni kaligrafi, pencak silat, pramuka, dan berbagai kegiatan pengembangan bakat lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar peserta didik, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Nursaleh dan Surtiati (2025) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kultural dan spiritual di sekolah Islam berkontribusi terhadap pembentukan identitas keagamaan peserta didik yang lebih kuat dan berakar pada tradisi dan budaya lokal. Integrasi antara nilai-nilai Islam lokal dan kurikulum formal sekolah menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih otentik dan bermakna bagi peserta didik.

Tantangan dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum berkaitan dengan koordinasi dan keselarasan visi. Tidak semua kontribusi masyarakat dapat langsung diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah tanpa melalui proses seleksi dan adaptasi yang mempertimbangkan standar mutu nasional dan visi pendidikan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam kurikulum bersifat konstruktif dan selaras dengan tujuan pendidikan. Bray (2001) juga mengingatkan bahwa kemitraan komunitas dalam pendidikan harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian mutu (quality assurance) yang ketat, sehingga partisipasi masyarakat tidak mengorbankan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Mutu

Dimensi keempat dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam adalah peran mereka dalam monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas mutu pendidikan. Fungsi kontrol sosial (social control) yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pendidikan yang baik (good education governance). Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama memiliki hak untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja sekolah Islam dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Hakim (2020) menemukan bahwa komite sekolah dalam menjalankan fungsi controlling mampu menjadi mekanisme efektif untuk memastikan bahwa pengelolaan sekolah Islam berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Fungsi controlling ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kinerja guru dan tenaga kependidikan, prestasi peserta didik, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar mutu yang berlaku.

Umpan balik (feedback) dari masyarakat merupakan input yang sangat berharga bagi perbaikan mutu pendidikan di sekolah Islam. Syah, Kurniady, dan Yuniarsih (2024) menemukan bahwa sekolah yang secara aktif mengumpulkan dan merespons umpan balik dari masyarakat menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat. Mekanisme umpan balik yang efektif dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti survei kepuasan orang tua, forum diskusi publik, rapat akbar wali murid, dan platform digital untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Pratiwi (2026) juga melaporkan bahwa komite sekolah di sekolah-sekolah Islam yang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program sekolah dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan dan dukungan publik terhadap sekolah Islam. Transparansi dalam menyampaikan informasi tentang kinerja sekolah, termasuk data prestasi peserta didik, kondisi fasilitas, dan penggunaan anggaran, merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya akuntabilitas pendidikan yang efektif.

Peran masyarakat sebagai mediator dan advokat juga menjadi aspek penting dari partisipasi dalam monitoring dan evaluasi mutu. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang standar mutu pendidikan dapat berperan sebagai jembatan antara sekolah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor. Mu'alimin, Muhith, dan Hepni (2026) menemukan bahwa dalam konteks manajemen mutu sekolah Islam, peran mediator masyarakat sangat penting dalam mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kepada pihak sekolah dan sebaliknya menyampaikan informasi dan pencapaian sekolah kepada masyarakat luas. Peran advokat masyarakat juga menjadi penting ketika sekolah Islam menghadapi tantangan kebijakan atau sumber daya, di mana dukungan masyarakat yang terorganisir dapat menjadi kekuatan negosiasi yang signifikan.

Tantangan dalam partisipasi monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kapasitas masyarakat untuk memahami indikator-indikator mutu pendidikan yang kompleks dan teknis. Banyak masyarakat yang memiliki kemauan untuk mengawasi kinerja sekolah namun tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang standar mutu, indikator kinerja, dan metode evaluasi yang digunakan dalam pendidikan. Oleh karena itu, edukasi publik tentang mutu pendidikan dan pelatihan bagi anggota komite sekolah dalam bidang monitoring dan evaluasi menjadi kebutuhan yang sangat penting. Julianto (2026) merekomendasikan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat

berpartisipasi secara efektif tanpa harus memiliki latar belakang akademis yang formal.

Model Sinergi Sekolah Islam dan Masyarakat: Menuju Ekosistem Pendidikan Berkualitas

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi dalam seluruh dimensi menghasilkan ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, responsif, dan berkelanjutan di sekolah Islam. Sinergi antara sekolah Islam dan masyarakat tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan dalam hal akademik, tetapi juga memperkuat dimensi sosial, spiritual, dan kultural yang menjadi keunggulan sekolah Islam. Hadi, Santosa, dan Wantu (2025) menemukan bahwa manajemen pendidikan Islam yang mampu membangun sinergi dengan masyarakat menghasilkan beberapa keunggulan kompetitif, yaitu: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan melalui dukungan sumber daya masyarakat; (b) peningkatan relevansi pendidikan melalui responsivitas terhadap kebutuhan lokal; (c) penguatan identitas dan karakter Islami melalui integrasi nilai-nilai komunitas; dan (d) peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik melalui transparansi pengelolaan.

Model sinergi sekolah Islam dan masyarakat yang ideal memerlukan beberapa prasyarat fundamental. Pertama, kepemimpinan sekolah yang demokratis-transformatif yang mampu memberdayakan masyarakat dan mengelola perbedaan kepentingan secara bijaksana. Bush dan Glover (2014) menekankan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif merupakan kunci keberhasilan dalam membangun kemitraan yang produktif antara sekolah dan masyarakat. Kedua, struktur organisasi yang mendukung partisipasi, termasuk keberadaan komite sekolah yang kuat, independen, dan representatif. Ketiga, mekanisme komunikasi yang efektif dan dua arah yang memungkinkan pertukaran informasi yang terbuka antara sekolah dan masyarakat. Keempat, budaya keterbukaan, kepercayaan, dan saling menghormati yang menjadi fondasi bagi seluruh bentuk interaksi dan kolaborasi.

Namun demikian, terdapat tantangan struktural dan kultural yang perlu diantisipasi dalam membangun sinergi sekolah Islam dan masyarakat. Tantangan struktural meliputi keterbatasan regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat yang bermakna, serta birokrasi yang seringkali menghambat inisiatif dan kreativitas masyarakat. Tantangan kultural meliputi mentalitas masyarakat yang masih terbatas dalam memandang pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, serta budaya patron-klien yang seringkali mewarnai hubungan antara sekolah dan masyarakat. Tantangan kapasitas meliputi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang manajemen pendidikan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan masyarakat,

pengembangan kapasitas sekolah, dan transformasi budaya organisasi yang mendukung partisipasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan. Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah Islam melibatkan empat dimensi utama yang saling terintegrasi, yaitu: (a) partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan melalui mekanisme komite sekolah dan musyawarah; (b) partisipasi dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang mencakup dukungan finansial, fasilitas, dan tenaga; (c) keterlibatan dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal; dan (d) partisipasi dalam monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas mutu pendidikan melalui fungsi kontrol sosial dan umpan balik.

Kedua, kontribusi partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah Islam bersifat multidimensional dan signifikan, mencakup peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan relevansi kurikulum, penguatan karakter dan identitas Islami peserta didik, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, serta penguatan modal sosial keagamaan yang menjadi keunikan sekolah Islam. Modal sosial keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam memberikan karakteristik yang membedakan partisipasi masyarakat di sekolah Islam dari sekolah umum, yaitu motivasi transendental yang membuat partisipasi bersifat lebih mendalam dan keberlanjutan. Ketiga, implementasi partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengembangan sekolah Islam memerlukan prasyarat berupa kepemimpinan sekolah yang demokratis-transformatif, struktur organisasi yang mendukung, mekanisme komunikasi yang efektif, budaya keterbukaan dan kepercayaan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Tantangan struktural, kultural, dan kapasitas yang dihadapi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang partisipatif, bermutu, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, I., & Said, H. (2013). Effect of community participation on educational quality. *Journal of Education and Vocational Research*, 4(2), 52-58.
- Bray, M. (2001). *Community partnerships in education: Dimensions, variations, and implications*. UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bush, T., & Glover, D. (2014). School leadership models: What do we know? *Educational Management Review*, 5(1), 1-16.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation, and evaluation*. Rural Development Committee, Cornell University.

- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Center for Advanced Engineering Study.
- Epstein, J. L. (2018). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Routledge.
- Hadi, S., Santosa, T. A., & Wantu, H. M. (2025). Islamic educational management and quality education. *Journal of Pendidikan Islam*, 6(1), 78–95. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPI/article/view/1739>
- Hakim, L. (2020). School committee participation in improving education quality. *Alishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 33–48. <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/215>
- Julianto, P. (2026). Community involvement and quality of Islamic education. *Indonesian Journal of Governance and Management*, 3(1), 22–38. <https://jurnal-ijgam.or.id/index.php/IJGAM/article/view/203>
- Kusumaningrum, D. D. E., & Ulfatin, N. N. (2017). Community participation in improving educational quality. Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/coema-17/25882334>
- Mu'alimin, M., Muhith, A. M., & Hepni, H. (2026). School quality management in Islamic schools. *International Journal of Educational Management*, 40(3), 456–472. [https://www.emerald.com/ijem/article/doi:10.1108/IJEM-05-2025-0387/1341763](https://www.emerald.com/ijem/article/doi/10.1108/IJEM-05-2025-0387/1341763)
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi kepala sekolah profesional: Dalam konteks mengimplementasikan standar nasional pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2021). Community participation in developing Islamic education. *Jurnal Ilmu Edukasi*, 7(1), 15–30. <https://ejournal.letiges.or.id/index.php/jie/article/view/213>
- Nursaleh, A., & Surtiati, T. R. (2025). Quality management in Islamic education and community engagement. *Journal of Science Education*, 4(1), 56–72. <https://jse.rezkimedia.org/index.php/jse/article/view/684>
- Parker, L., & Raihani, R. (2011). Community participation in Islamic schooling in Indonesia. *Educational Management Administration & Leadership*, 39(5), 610–628. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1741143211416389>
- Parji, F., & Prasetya, A. (2020). Community participation in developing educational quality. *Revista de Educacion a Distancia*, 62, 1–18. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8069672>
- Pratiwi, S. N. (2026). School committee and quality improvement in Islamic schools. *Indonesian Journal of Education*, 5(2), 88–104. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/IJE/article/view/1533>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Siagian, Z., et al. (2025). Community participation in supporting Islamic education quality. *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 42–58. <https://ejournal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/456>

- Sumarsono, R. B., & Imron, A. (2025). Parental engagement in Islamic primary education. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 45–62. <https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/1919>
- Syah, S., Kurniady, D. A., & Yuniarsih, T. (2024). School management based on community participation. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 57(1), 112–128. <https://jpp.fkip.unila.ac.id/index.php/jpp/article/view/165>
- Waluyo, A., & Jasiah, J. (2025). Community-based education management in Islamic institutions. *Al-Fikrah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 67–84. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/16323>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.